

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESENJANGAN PENDAPATAN DI JAWA BARAT

(ANALYSIS OF FACTORS WHICH INFLUENCE INCOME INEQUALITY IN
PROVINCE OF WEST JAVA

Oleh:
MEIDY HAVIZ
D 99.0.315

ARTIKEL

ABSTRAK

Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan dalam penelitian ini mengikuti kerangka teoritis yang dikemukakan oleh Anneli Kaasa (2005), yang mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut menjadi lima kelompok, yaitu kelompok kategori Pembangunan Ekonomi, kategori Faktor-Faktor Demografi, kategori Faktor-Faktor Politik, kategori Faktor-Faktor Budaya dan Lingkungan, dan kategori Faktor-Faktor Makroekonomi. Dari hasil estimasi menggunakan metode regresi panel data didapatkan hasil bahwa Pertumbuhan ekonomi dan Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan di kabupaten dan kota di Jawa Barat, akan tetapi pengaruh tersebut tidak terlalu signifikan. Sektor pemerintah dan pengangguran berpengaruh negatif dan sangat signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ketersediaan sumber daya alam memiliki pengaruh positif terhadap kesenjangan pendapatan di kabupaten dan kota di Jawa Barat, akan tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan. Dari hasil analisis, ternyata hubungan antara kesenjangan pendapatan dan pendapatan per kapita di kabupaten dan kota di Jawa Barat, mengikuti hipotesis yang dikemukakan oleh Kuznets, dimana pada pendapatan per kapita yang masih rendah, kesenjangan pendapatan akan meningkat, dan kemudian seiring dengan makin tingginya pendapatan perkapita, kesenjangan tersebut akan mulai menurun.

Kata Kunci: Kesenjangan Pendapatan, Hipotesis Kuznets

ABSTRACT

Analysis of the factors which influence income inequality will follows theoretical overviews which proposed by Anneli Kaasa (2005). The factors of income inequality are taken to fall into the following categories, economic development, demographic factors, cultural and environmental factors, and macroeconomic factors. The result of estimating panel regression equation shows that, economic growth and education negatively not significant affect income inequality. Government sectors and unemployment positively significant affect the income inequality, and natural resources positively not significant affect the income inequality. Furthermore, from the estimation result, relationship between per capita income and income inequality will follows Kuznets hypothesis, that there is an inverted U curve relating levels of per capita income to income inequality, with income inequality first becoming more unequal, and at a later state more equal, as per capita income rises.

Keywords: Income inequality, Kuznets Hypothesis.

1. PENDAHULUAN

Distribusi pendapatan diantara anggota masyarakat merupakan suatu hal yang penting. Distribusi pendapatan yang baik akan mempengaruhi keterpaduan dan persatuan masyarakat, dan pada tingkatan GDP tertentu, akan menentukan tingkat kemiskinan. Sensitivitas tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan tergantung pada distribusi pendapatan suatu negara (Sen, 1995, dikutip dari Stewart, 2000), dimana pengaruh pertumbuhan GDP terhadap pengurangan kemiskinan, akan memiliki pengaruh yang lebih besar pada negara yang memiliki distribusi pendapatan yang lebih baik.

Dalam kehidupan politik dan kenegaraan, kesenjangan pendapatan juga memiliki dampak yang tidak menguntungkan. Terdapat tiga cara yang berbeda, dimana kesenjangan bisa berpengaruh secara politis (Glaeser, 2005). Pertama, meningkatnya kesenjangan pendapatan akan membawa pada menguatnya keinginan untuk melakukan redistribusi. Kedua, kesenjangan yang lebih tinggi bisa mengurangi redistribusi dan penentuan barang publik, karena sumber daya ekonomi ikut mempengaruhi output politis yang akan dihasilkan. Ketiga, kesenjangan dalam perekonomian bisa mempengaruhi struktur institusi politik secara keseluruhan, misalnya tentang demokrasi. Dengan membagi dunia menjadi dua, yaitu sebagian negara dengan distribusi pendapatan yang relatif merata dan sebagian lagi yang relatif tidak merata,

berdasarkan koefisien Gini dari *World Bank*, didapatkan hasil bahwa, 95% negara yang memiliki distribusi pendapatan yang relatif merata, diklasifikasikan sebagai negara demokrasi, dan hanya 75% dari negara yang relatif memiliki distribusi pendapatan kurang merata yang bisa diklasifikasikan sebagai negara demokrasi (Jaggers & Marshal, 2000, dikutip dari Glaeser, 2005).

Dalam kehidupan sosial masyarakat, masalah ketimpangan pendapatan juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan salah satu sumber kerawanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesenjangan pendapatan berpotensi memicu timbulnya kriminalitas dalam masyarakat. Kriminalitas cenderung lebih tinggi dalam masyarakat yang memiliki ketimpangan dalam distribusi pendapatannya. Interpretasi dari hubungan ini bisa dijelaskan, karena ketimpangan yang meningkat, hasil yang diperoleh oleh si miskin yang melakukan tindak kriminal akan semakin besar, karena korbannya yang jauh lebih kaya, dan *opportunity cost* melakukan tindak kriminal menjadi lebih kecil (Fajnzylber, Lederman & Loayza, 2002, dikutip dari Glaeser, 2005).

Pada tahun 1955, Simon Kuznets mengemukakan hubungan antara GNP per kapita dengan kesenjangan dalam distribusi pendapatan, yang secara grafis digambarkan menyerupai huruf U terbalik (*inverted U*). Naiknya pendapatan per kapita akan disertai dengan naiknya kesenjangan pendapatan, sampai pada nilai maksimum tingkat

pendapatan menengah (*intermediate level of income*). Pada tingkatan pendapatan per kapita yang lebih tinggi, dengan dicapainya karakteristik tingkat pendapatan negara industri, kesenjangan akan menurun (Gillis, Perkins, Roemer & Snodgrass, 1996). Kuznets mengemukakan pendapatnya tersebut berdasarkan estimasi menggunakan data yang tersedia tentang distribusi pendapatan pada beberapa negara kaya dan miskin dan bagaimana trend distribusi pendapatan tersebut pada sejumlah negara di Eropa.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tiga dekade terakhir diakui telah banyak memberikan kemajuan materiil, tetapi mengandung dua masalah serius. Pertama, perekonomian Indonesia masih sangat rentan terhadap kondisi eksternal dan volatilitas pasar finansial dan komoditas. Kedua, kemajuan ekonomi yang telah dicapai ternyata sangat tidak merata, baik antardaerah maupun antar kelompok sosial ekonomi. Kemajuan materiil yang telah dicapai melalui strategi pertumbuhan selama 30 tahun terakhir ini tidak banyak memberikan sumbangan yang sesungguhnya terhadap “pembangunan” (Mubyarto dan Bromley, 2002).

Pada periode 1973-1993, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan distribusi pendapatan yang membaik (Demery, 1995; Chu 1999; dikutip dari Stewart, 2000). Setelah mengalami pukulan yang teramat berat pada waktu terjadi krisis ekonomi tahun 1997,

perekonomian mengalami kontraksi yang amat besar, dan terjadi kemunduran perekonomian beberapa tahun kebelakang, pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi merosot sampai pada angka -13,1%. Untunglah kondisi ini mulai mengalami perbaikan, sehingga dari tahun ke tahun perekonomian mulai pulih, dan pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai angka 4,1%. Walaupun kondisi ini cukup menggembirakan, akan tetapi seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai membaik, masalah distribusi pendapatan masih mengkhawatirkan. Kondisi ini akan bermuara pada masih banyaknya penduduk Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2003, persentase penduduk yang masih berada dibawah garis kemiskinan adalah sebesar 17,4% atau setara dengan kira-kira 37,2 juta jiwa (Bank Indonesia, 2003).

Setelah dihantam krisis ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang melorot drastis pada tahun 1998, pada tahun-tahun berikutnya mulai mengalami perbaikan, laju pertumbuhan ekonomi berangsur-angsur pulih ke kondisi sebelum krisis. Pada tahun 1999, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat adalah 2,30% (Laju Pertumbuhan PDRB, termasuk minyak bumi dan gas, atas dasar harga konstan tahun 1993). Pada tahun 2004 dan 2005 Laju Pertumbuhan PDRB ini telah menyentuh angka 5%, masing-masing sebesar 5,16% dan 5,47%. Kondisi ini tentu saja cukup menggembirakan, pertanda mulai pulihnya

perekonomian Jawa Barat pasca krisis ekonomi.

Distribusi pendapatan di Jawa Barat relatif sudah lebih baik dibandingkan kondisi secara nasional. Kesenjangan pendapatan di Jawa Barat dari tahun 2001 sampai tahun 2004 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2001, Koefisien Gini di Jawa Barat adalah sebesar 0,235. Pada tahun 2002, Gini rasio di Jawa Barat turun menjadi 0,201. Berturut-turut terus mengalami penurunan sampai tahun 2004, yaitu 0,189 pada tahun 2004, dan 0,185 pada tahun 2004. Akan tetapi, pada tahun 2005 angka Gini rasio tersebut kembali mengalami kenaikan menjadi 0,191.

Pada tahun 1955, Simon Kuznets mengemukakan hubungan antara GNP per kapita dengan kesenjangan dalam distribusi pendapatan, yang secara grafis digambarkan menyerupai huruf U terbalik (*inverted U*). Naiknya pendapatan per kapita akan disertai dengan naiknya kesenjangan pendapatan, sampai pada nilai maksimum tingkat pendapatan menengah (*intermediate level of income*). Pada tingkatan pendapatan per kapita yang lebih tinggi, dengan dicapainya karakteristik tingkat pendapatan negara industri, kesenjangan akan menurun (Gillis, Perkins, Roemer & Snodgrass, 1996: p-80). Kuznets mengemukakan pendapatnya tersebut berdasarkan estimasi menggunakan data yang tersedia tentang distribusi pendapatan pada beberapa negara kaya dan miskin dan

bagaimana trend distribusi pendapatan tersebut pada sejumlah negara di Eropa.

Penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kesenjangan pendapatan pada umumnya terinspirasi oleh hasil yang dikemukakan oleh Kuznets, beberapa bukti empiris mendukung argumen yang dikemukakan oleh Kuznets (Paukert, 1973; Oswang, 1994; Ali, 1998; Milanovic, 1994; Fishlow, 1995; dikutip dari Stewart, 2000). Sementara bukti yang lain menunjukkan hubungan yang lemah antara pendapatan per kapita dengan kesenjangan pendapatan (Anand & Kanbur, 1993; dikutip dari Stewart, 2000). Bahkan ada juga bukti empiris yang menolak hipotesis yang dikemukakan oleh Kuznets tersebut (Deininger & Square, 1998; Bourguignon, 1995; dikutip dari Stewart, 2000).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan bisa dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu pembangunan ekonomi, faktor-faktor demografi, faktor-faktor politik, faktor-faktor budaya dan lingkungan, dan faktor-faktor makroekonomi (Kaasa, 2005).

Dalam berbagai literatur, pembangunan ekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan mendapat perhatian yang cukup banyak. Faktor-faktor yang termasuk kedalam kategori pembangunan ekonomi ini antara lain adalah, kesejahteraan suatu negara (*country's wealth*), yang seringkali diukur dengan PDB per kapita,

pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pembangunan teknologi (*technological development*), dan pembangunan struktur ekonomi (*development of economic structure*).

Faktor demografi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan. Beberapa faktor yang termasuk ke dalam kelompok faktor demografi diantaranya adalah, urbanisasi, struktur usia masyarakat, komposisi rumahtangga, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pendidikan masyarakat, misalnya kesenjangan pendidikan dan pengeluaran untuk pendidikan.

Faktor politik juga dipertimbangkan sebagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap kesenjangan pendapatan. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah, *share* sektor pemerintah dan swasta dalam perekonomian, demokratisasi, liberalisasi, dan lain sebagainya.

Peranan yang penting telah dimainkan oleh faktor budaya dan lingkungan, dalam mempengaruhi kesenjangan pendapatan. Faktor-faktor yang termasuk kedalam kelompok faktor budaya dan lingkungan ini diantaranya adalah, konsentrasi lahan, variasi budaya, ekonomi bayangan, korupsi, dan juga melimpahnya sumberdaya alam.

Dalam dua dekade terakhir, faktor makroekonomi dipertimbangkan sebagai faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah, inflasi, pengangguran, pembangunan

finansial, ekspor, import, dan investasi luar negeri.

METODE ANALISIS

Studi ini dilakukan dalam lingkup regional, yaitu pada propinsi Jawa Barat, dengan menggunakan data dari masing-masing kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat sebagai bahan analisis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, pendidikan, porsi pemerintah, ketersediaan sumberdaya alam, dan tingkat pengangguran, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan juga ingin mengetahui apakah hubungan antara pendapatan perkapita dan kesenjangan pendapatan di kabupaten dan kota di Jawa Barat, mengikuti hipotesis yang dikemukakan oleh Kuznets, dimana pada awalnya, dengan meningkatnya pendapatan perkapita, kesenjangan pendapatan akan meningkat, dan sejalan dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita, kemudian kesenjangan pendapatan tersebut akan menurun.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek pada masa sekarang dan masa yang lalu, untuk mengetahui fenomena yang terjadi sesuai dengan tujuan penelitian, dan menggunakan literatur serta pengolahan data sekunder sebagai bahan analisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang semuanya bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Barat.

Model empiris berdasarkan panel data yang meneliti hubungan antara kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan diantaranya dikemukakan oleh Barro, 1991 (dikutip dari Fielding dan Torres, 2005), melalui persamaan regresi:

$$g_{it} = b_0 + f(y_{it}) + b_1 x_{it} + u_{it}$$

Dimana,

g_{it} = koefisien Gini atau indeks kesenjangan yang lain.

y_{it} = *income per capita* di negara i pada periode t .

x_{it} = sekumpulan variabel sosial dan ekonomi.

u_{it} = residual

dan fungsi non linier $f(\cdot)$ merefleksikan hipotesis dari Kuznet bahwa kesenjangan pada awalnya meningkat, kemudian menurun seiring dengan kenaikan *income per capita*.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mencoba untuk mengaplikasikan model empiris tersebut, untuk melihat hubungan antara kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, dengan memasukkan beberapa variabel sosial-ekonomi & demografi ke dalam model, dan diaplikasikan pada objek penelitian daerah tingkat II di Jawa Barat.

Selain variabel pertumbuhan ekonomi dan kuadrat dari pertumbuhan ekonomi, variabel lain yang akan dimasukkan ke dalam model

empiris adalah variabel pendidikan, porsi pemerintah dalam pembangunan, ketersediaan sumberdaya alam, dan tingkat pengangguran. Persamaan regresi dari model empiris tersebut adalah:

$$GIN_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot GRW_{it} + \beta_2 \cdot IPC_{it}^2 + \beta_3 \cdot EDU_{it} + \beta_4 \cdot GOV_{it} + \beta_5 \cdot NAT_{it} + \beta_6 \cdot UNE_{it} + v_{it}$$

Dimana:

GIN_{it} = Kesenjangan pendapatan di daerah i pada tahun t , diproksi dengan menggunakan Indeks Gini

GRW_{it} = Pertumbuhan ekonomi di daerah i pada tahun t , diproksi dengan menggunakan data Laju Pertumbuhan PDRB.

IPC_{it}^2 = Kuadrat pendapatan per kapita di daerah i pada tahun t

EDU_{it} = Tingkat Pendidikan di daerah i pada tahun t , diproksi dengan menggunakan data angka melek huruf.

GOV_{it} = Share sektor pemerintah di daerah i pada tahun t , diproksi dengan menggunakan data proporsi pengeluaran pemerintah dalam PDRB.

NAT_{it} = Melimpahnya sumberdaya alam yang dimiliki oleh daerah i pada tahun t , diproksi dengan menggunakan data proporsi PDRB yang disumbangkan oleh penjumlahan sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan, dan sektor Pertambangan dan Penggalan.

UNE_{it} = Angka pengangguran di daerah i pada tahun t , diproksi dengan menggunakan data tingkat pengangguran terbuka.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teknik regresi dengan data panel. Data panel atau data longitudinal adalah data yang merupakan gabungan antara data menurut deret waktu (*time series*) dan data antar individu pada satu waktu (*cross section*).

Data panel yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai *balanced panel*, karena masing-masing unit *cross section* mempunyai banyaknya observasi *time series* yang sama. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fixed effect*, karena banyaknya observasi *cross section* lebih banyak

dibandingkan dengan banyaknya observasi *time series*. Selain itu, pemilihan untuk menggunakan *fixed effect* juga karena penggunaan kota dan kabupaten di propinsi Jawa Barat diasumsikan sudah mewakili populasi, bukan merupakan sampel kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat. Asumsi lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah, semua unit individu memiliki *slope* yang identik, akan tetapi memiliki konstanta atau *intercept* yang berbeda-beda.

Menurut Judge et.al dalam Gujarati (2003), ketika N besar dan T kecil, estimasi yang dihasilkan oleh *Fixed Effect Model (FEM)* dan estimasi yang dihasilkan oleh *Random Effect Model (REM)* bisa berbeda secara signifikan. Jika diyakini bahwa secara *cross section* satuan pada sampel penelitian tidak memberikan gambaran random dari sampel yang lebih besar, maka metode FEM akan lebih sesuai dibanding metode REM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dikemukakan hasil estimasi yang didapatkan dengan menggunakan teknik regresi *Generalized Least Square (GLS)* dengan data panel. Metode estimasi panel data yang dipakai adalah menggunakan pendekatan *fixed effect (FEM)* atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)*.

Periode waktu yang akan dianalisis adalah dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005, dan unit *cross section* adalah sebanyak 21 (21

kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dari keseluruhan kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat sebanyak 25, maka Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar tidak dimasukkan ke dalam analisis, dengan pertimbangan data yang tersedia untuk keempat kota tersebut tidak mencukupi.

Dari persamaan awal:

$$GIN_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot GRW_{it} + \beta_2 \cdot IPC_{it}^2 + \beta_3 \cdot EDU_{it} + \beta_4 \cdot GOV_{it} + \beta_5 \cdot NAT_{it} + \beta_6 \cdot UNE_{it} + v_{it}$$

i = kabupaten dan kota di Jawa Barat

t = periode waktu analisis

Regresi panel data menggunakan pendekatan *fixed effect* dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa *intercept* diantara unit *cross section* (diantara kabupaten dan kota) bisa berbeda-beda, sementara *slope* atau koefisien regresi tidak berbeda diantara unit *cross section* dan selama periode analisis. Untuk membedakan *intercept* pada masing-masing kabupaten dan kota, digunakan teknik variabel *dummy*, sehingga persamaan diatas bisa ditulis:

$$GIN_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_{2it} + \alpha_3 D_{3it} + \dots + \alpha_{21} D_{21it} + \beta_1 \cdot GRW_{it} + \beta_2 \cdot IPC_{it}^2 + \beta_3 \cdot EDU_{it} + \beta_4 \cdot GOV_{it} + \beta_5 \cdot NAT_{it} + \beta_6 \cdot UNE_{it} + v_{it}$$

..... (4.2)

D merupakan variabel dummy.

Dengan menggunakan bantuan *software* E-views versi 5.0, output hasil estimasi adalah sebagai berikut:

Hasil Estimasi Persamaan Regresi

Dependent Variable: GIN
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 09/01/07 Time: 03:30
Sample: 1999 2005
Cross-sections included: 21
Total panel (balanced) observations: 147
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	33.88710	13.62412	2.487287	0.0142
GRW	-0.134444	0.112591	-1.194090	0.2348
IPC2	-0.024929	0.010319	-2.415846	0.0172
EDU	-0.097183	0.149338	-0.650758	0.5164
GOV	-0.431354	0.118895	-3.634143	0.0004
NAT	0.013775	0.046177	0.298309	0.7660
UNE	-0.184151	0.073451	-2.507138	0.0135

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.948415	Mean dependent var	24.58457
Adjusted R-squared	0.937239	S.D. dependent var	12.44269

Estimation Command:

```
=====  
LS(CX=F,WGT=CXDIAG) GIN C GRW  
IPC2 EDU GOV NAT UNE
```

Estimation Equation:

```
=====  
GIN = C(1) + C(2)*GRW + C(3)*IPC2 +  
C(4)*EDU + C(5)*GOV + C(6)*NAT +  
C(7)*UNE + [CX=F]
```

Substituted Coefficients:

```
=====  
GIN = 33.88709636 - 0.1344440014*GRW -  
0.02492917607*IPC2 - 0.09718306847*EDU  
- 0.431353631*GOV + 0.01377503103*NAT  
- 0.1841513702*UNE + [CX=F]
```

Efek untuk masing-masing unit *cross section* yaitu untuk masing-masing kabupaten dan kota merupakan *differential intercept* dari persamaan regresi. Efek tersebut akan

membedakan *intercept* untuk persamaan pada masing-masing unit *cross section*. Perbedaan *intercept* untuk masing-masing kabupaten dan kota tersebut menunjukkan adanya perbedaan faktor-faktor *endowment*, perbedaan kemampuan masing-masing kabupaten dan kota dalam hal kondisi awal perekonomian yang bisa disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya perbedaan dalam gaya kepemimpinan di masing-masing daerah, perbedaan kebijakan, dan faktor-faktor lainnya.

Nilai *effect* pada intersep untuk masing-masing unit *cross section* (kabupaten dan kota)

No.	CROSSID	Cross Section Unit	Effect
1	1	Kabupaten Bogor	-1.106453
2	2	Kabupaten Sukabumi	0.398085
3	3	Kabupaten Cianjur	-2.952211
4	4	Kabupaten Bandung	0.054112
5	5	Kabupaten Garut	1.393126
6	6	Kabupaten Tasikmalaya	2.202387
7	7	Kabupaten Ciamis	-1.215059
8	8	Kabupaten Kuningan	-1.177104
9	9	Kabupaten Cirebon	1.702191
10	10	Kabupaten Majalengka	2.283659
11	11	Kabupaten Sumedang	-0.320297
12	12	Kabupaten Indramayu	-2.961299
13	13	Kabupaten Subang	-3.696492
14	14	Kabupaten Purwakarta	-0.647283
15	15	Kabupaten Karawang	-0.314444
16	16	Kabupaten Bekasi	2.473862
17	17	Kota Bogor	-0.825884
18	18	Kota Sukabumi	3.539140
19	19	Kota Bandung	-2.632017
20	20	Kota Cirebon	6.554689
21	21	Kota Bekasi	-2.752705

Sumber: Hasil Regresi

Berdasarkan hasil regresi, dari nilai *effect* pada masing-masing unit *cross section* bisa didapatkan persamaan untuk masing-masing kabupaten dan kota yang dianalisis. Persamaan tersebut memiliki koefisien regresi atau *slope* yang sama, sementara *intercept* berbeda-beda sesuai dengan besarnya *effect* pada masing-masing *cross section unit*. *Intercept* untuk masing-masing kabupaten dan kota didapatkan dengan menjumlahkan *common intercept* dari hasil regresi dengan *effect* pada masing-masing unit *cross section*.

Setelah melakukan serangkaian pengujian, baik secara statistik maupun uji asumsi klasik maka dalam bagian ini akan dilakukan pembahasan terhadap hasil regresi yang didapatkan. Dalam hal ini akan dianalisis tentang pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model regresi.

Pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Jawa Barat, tidak terlalu signifikan sebagai faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan. Dengan nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,2348, maka pada tingkat signifikansi sebesar 1% atau 5%, variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kesenjangan pendapatan.

Mengacu pada nilai probabilitas t-statistik tersebut, pertumbuhan ekonomi hanya akan signifikan mempengaruhi kesenjangan pendapatan jika diukur pada tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,2348, atau

pada tingkat kepercayaan yang lebih kecil daripada 0,7652. Pada tingkat kepercayaan lebih kecil daripada 76,52%, pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara negatif terhadap kesenjangan pendapatan, dengan koefisien regresi sebesar $-0,13444$. Artinya, perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% *ceteris paribus*, akan mengakibatkan perubahan pada kesenjangan pendapatan sebesar 0,13444%, dengan arah yang berlawanan. Jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, maka kesenjangan pendapatan akan berkurang sebesar 0,13444%.

Hasil yang didapatkan serupa dengan kesimpulan dalam studi empiris yang dilakukan oleh Chang dan Ram (2000), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat, akan mengurangi kesenjangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, akan berakibat pada semakin berkurangnya kesenjangan pendapatan.

Dengan asumsi tingkat kepercayaan yang digunakan adalah lebih kecil daripada 76,52 %, misalnya pada tingkat kepercayaan 75 %, pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh kabupaten dan kota di Jawa Barat memberikan kontribusi terhadap penurunan kesenjangan pendapatan di daerah-daerah yang dianalisis. Kondisi ini cukup menggembirakan, karena kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga disertai dengan kesenjangan pendapatan yang juga tinggi, tidak terbukti di kabupaten dan kota di Jawa Barat. Hal ini berarti, pencapaian dalam pembangunan

perekonomian sudah bisa dinikmati secara relatif lebih merata oleh banyak lapisan dalam masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi sudah memiliki efek distribusi yang relatif baik dalam masyarakat, sehingga akan berdampak pada berkurangnya kesenjangan pendapatan dalam masyarakat.

Implikasi terhadap kebijakan, untuk kasus kabupaten dan kota di Jawa Barat, strategi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan bisa dilakukan salah satunya dengan terus memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentu saja dibarengi dengan kebijakan-kebijakan redistribusi yang lebih baik lagi, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut akan semakin dirasakan secara lebih merata oleh segenap lapisan masyarakat. Hal ini penting, karena ternyata pertumbuhan ekonomi tidak terlalu signifikan berperan sebagai faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan. Dengan pengaturan yang lebih baik, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan kesenjangan pendapatan di kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Faktor pendidikan hanya memiliki probabilitas t-statistik sebesar 0,5164, artinya pada tingkat signifikansi sebesar 1% atau 5%, faktor pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesenjangan pendapatan. Hanya jika digunakan tingkat signifikansi yang lebih besar, misalnya untuk tingkat signifikansi yang lebih besar daripada 0,5164, atau pada tingkat

kepercayaan yang lebih kecil dari 0,4836 faktor pendidikan ini bisa dikatakan berpengaruh terhadap kesenjangan pendapatan.

Koefisien regresi variabel pendidikan ini adalah sebesar -0,097183, jika terjadi peningkatan 1% pada sektor pendidikan, dalam hal ini meningkatnya angka melek huruf di kabupaten dan kota di Jawa Barat *ceteris paribus*, akan menurunkan kesenjangan pendapatan sebesar 0,097183%. Pada tingkat kepercayaan lebih kecil daripada 48,36%, peningkatan pada faktor pendidikan ini akan berpengaruh pada berkurangnya kesenjangan pendapatan. Sehingga penanganan yang lebih baik pada sektor pendidikan, yang akan tercermin dengan semakin meningkatnya angka melek huruf, akan berakibat pada berkurangnya kesenjangan pendapatan di kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Secara umum, terdapat dua pendapat mengenai pengaruh pendidikan terhadap kesenjangan pendapatan. Pendapat pertama mengemukakan bahwa pendidikan akan berasosiasi secara positif dengan kesenjangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, bisa menjadi jaminan bagi tingkat pendapatan yang juga lebih tinggi (Kaasa, 2005). Pendapat ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Chiswick (1971), dan Cornia dan Kiiski (2001). Begitu juga studi yang dilakukan oleh Nielsen dan Alderson (1997), menemukan bahwa terjadi kenaikan kesenjangan

pendapatan sebagai akibat dari heterogenitas pendidikan yang semakin tinggi.

Pendapat kedua mengemukakan bahwa, faktor pendidikan akan berkorelasi secara negatif dengan kesenjangan pendapatan, karena dengan meningkatnya pendidikan, akan semakin terbuka kesempatan bagi orang yang berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya melalui jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan dengan pendapatan yang juga lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Todaro, bahwa peningkatan pendidikan akan dapat membantu keluarga untuk meningkatkan pendapatannya, dan keluar dari lingkaran kemiskinan (Todaro dan Smith, 2003). Pendapat ini didukung oleh analisis empiris yang dilakukan oleh Sylvester (2002), dengan menggunakan indikator pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, menyimpulkan bahwa faktor pendidikan ini akan berasosiasi secara negatif dengan kesenjangan pendapatan.

Dalam penelitian ini, variabel pendidikan ternyata tidak signifikan sebagai faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan. Hasil yang didapatkan ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Doessel dan Valadkhani (1998), dengan menggunakan indikator pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, tidak signifikan sebagai faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan. Penjelasan terhadap hal ini bisa diakibatkan karena indikator yang

digunakan adalah Angka Melek Huruf, yang ternyata tidak bisa menjelaskan pengaruhnya terhadap kesenjangan pendapatan. Dalam hal ini, tinggi rendahnya Angka Melek Huruf tidak memiliki pengaruh yang cukup berarti terhadap tinggi rendahnya kesenjangan pendapatan yang terjadi.

Sektor pemerintah, dalam penelitian ini diproksi dengan menggunakan proporsi pengeluaran pemerintah dalam PDRB, memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas t-statistik yang sangat kecil, yang berarti baik pada tingkat signifikansi 5% atau 1%, bahkan sampai tingkat signifikansi 0,04%, variabel proporsi pengeluaran pemerintah dalam PDRB ini sangat berpengaruh terhadap kesenjangan pendapatan.

Nilai koefisien regresi variabel GOV adalah sebesar -0,431354, artinya kenaikan proporsi pengeluaran pemerintah dalam PDRB sebesar 1% *ceteris paribus*, akan mengakibatkan menurunnya kesenjangan pendapatan sebesar 0,431354 %, dan sebaliknya. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengeluaran pemerintah di kabupaten dan kota di Jawa Barat memiliki efek distribusi yang sudah baik, yang bisa dinikmati relatif secara merata oleh rakyat.

Proporsi sektor pemerintah dalam perekonomian yang seringkali diukur dengan menggunakan porsi pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dalam GDP. Dalam

kasus kabupaten dan kota, yang digunakan adalah proporsi pengeluaran pemerintah dalam PDRB. Proporsi pengeluaran pemerintah yang besar adalah dalam bentuk *transfers* seperti pembayaran pensiun, subsidi, dan bantuan, yang memiliki fungsi redistribusi dan pemerataan dalam masyarakat. Makin besar proporsi pengeluaran pemerintah semacam ini, makin rendah kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Pengaruh proporsi sektor pemerintah terhadap berkurangnya kesenjangan telah dianalisis dalam beberapa studi menggunakan data panel. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Durham (1999), dan Clarke, Xu, dan Zou (2003). Selain itu, hasil yang sama juga dikemukakan oleh Stack (1978), dengan menggunakan data *cross section*.

Bagaimanapun, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pengurangan kesenjangan pendapatan, tergantung pada *share transfers* dalam total pengeluaran. Jika sebagian besar pengeluaran pemerintah dialamatkan pada golongan masyarakat yang lebih mampu, pengeluaran pemerintah malah bisa berakibat sebaliknya, yaitu meningkatkan kesenjangan pendapatan (Xu dan Zou, 2000; Clarke, Xu, dan Zou, 2003). Studi yang dilakukan oleh Blejer dan Guerrero (1990) menunjukkan bahwa, tingginya kesenjangan pendapatan dihubungkan dengan besarnya pengeluaran pemerintah yang dialamatkan pada proyek-proyek industri, yang lebih

memberikan manfaat bagi orang kaya dibandingkan dengan manfaat secara sosial.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Durham (1999), dan Clarke, Xu, dan Zou (2003) dan Stack (1978). Hasil yang diperoleh juga sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Doessel dan Valadkhani (1998) dimana pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan. Hal ini berarti, pengeluaran pemerintah telah memiliki dampak redistribusi yang relatif baik sehingga memberikan dampak yang luas kepada segenap lapisan masyarakat, sehingga akan bermuara pada peningkatan pendapatan golongan masyarakat yang berpendapatan rendah, dan berkurangnya kesenjangan pendapatan.

Keberadaan sumber daya alam di kabupaten dan kota di Jawa Barat, yang dalam penelitian ini diproksi dengan menggunakan proporsi sumber daya alam dalam PDRB, ternyata tidak signifikan sebagai faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan. Dengan nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,7660 maka pada tingkat signifikansi 1% atau 5% variabel ini tidak signifikan mempengaruhi kesenjangan pendapatan.

Menggunakan tingkat signifikansi yang lebih besar atau tingkat kepercayaan yang lebih kecil, misalnya pada tingkat kepercayaan yang lebih kecil dari 23,4%, analisis terhadap variabel ini masih bisa dilakukan. Dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,013775 dan bernilai

positif, berarti perubahan proporsi sumber daya alam dalam PDRB sebesar 1% *ceteris paribus*, akan mengakibatkan perubahan pada kesenjangan pendapatan sebesar 0,013775 % dengan arah yang sama. Kenaikan proporsi sumber daya alam dalam PDRB sebesar 1% akan mengakibatkan kesenjangan pendapatan juga meningkat sebesar 0,013775 %, begitu juga sebaliknya.

Mengacu pada data yang ada, tidak signifikannya variabel sumber daya alam ini bisa dipahami mungkin karena tidak semua kabupaten dan kota di Jawa Barat memiliki sumber daya alam yang lengkap. Misalnya untuk sumber daya alam mineral, yang berasal dari hasil pertambangan dan penggalian tidak dimiliki oleh semua kota di Jawa Barat. Untuk kota, hanya Kota Sukabumi yang memiliki sumbangan terhadap PDRB yang berasal dari sektor pertambangan dan penggalian, sementara kota yang lain tidak memiliki sumbangan dari sektor pertambangan dan penggalian ini terhadap PDRB-nya masing-masing.

Selain itu, ada juga kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang relatif lebih melimpah dibanding kabupaten dan kota yang lain. Misalnya Kabupaten Indramayu, yang memiliki sumbangan dari sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB, yang relatif jauh lebih besar dibanding daerah lain, yang akan menciptakan *outlier* dalam data, sehingga diduga ikut berperan terhadap

ketidaksignifikanan variabel sumber daya alam ini.

Pada tingkat signifikansi sebesar 5%, variabel pengangguran, yang dalam penelitian ini diproksi dengan menggunakan angka pengangguran terbuka, secara signifikan berpengaruh terhadap kesenjangan pendapatan. Dari nilai probabilitas t-statistik yang sebesar 0,0135, variabel ini malah akan signifikan sampai pada tingkat signifikansi 0,0135 atau sampai tingkat kepercayaan 98,65%.

Nilai koefisien regresi variabel pengangguran ini adalah sebesar -0,184151, artinya jika terjadi kenaikan angka pengangguran (angka pengangguran terbuka) sebesar 1% *ceteris paribus*, maka kesenjangan pendapatan akan berkurang sebesar 0,184151 %. Sebaliknya jika terjadi penurunan angka pengangguran sebesar 1% *ceteris paribus*, maka kesenjangan pendapatan akan meningkat sebesar 0,184151 %.

Beberapa studi menunjukkan bukti-bukti empiris yang mengindikasikan bahwa pengangguran terutama akan mempengaruhi orang-orang dengan tingkat pendapatan rendah. Hal ini akan mengakibatkan tingkat pendapatan mereka menjadi semakin rendah, sehingga kesenjangan pendapatan akan meningkat (Gustafsson dan Johansson, 1997 dan Dimelis dan Livada, 1999). Studi yang lain juga menunjukkan bahwa kenaikan angka pengangguran akan membawa pada meningkatnya kesenjangan pendapatan,

misalnya studi yang dilakukan oleh Jantti (1994) dan Abdel-Ghany (1996).

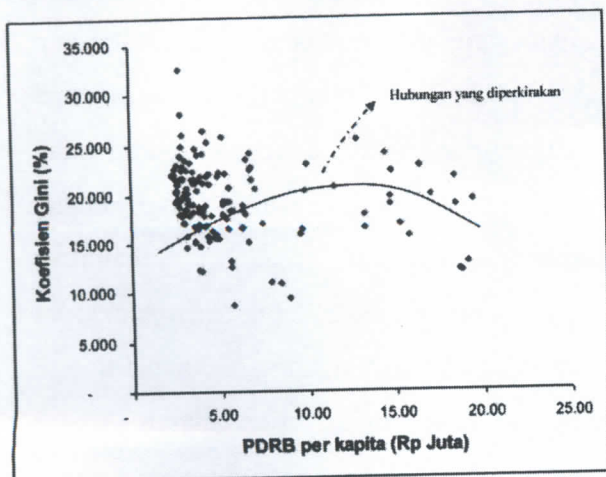
Dilain pihak, studi yang dilakukan oleh Nielsen dan Alderson (1997) menyimpulkan hal yang sebaliknya, hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi berasosiasi dengan kesenjangan pendapatan yang rendah. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menyimpulkan hal yang sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Nilesen dan Alderson tersebut. Dari interpretasi koefisien regresi variabel pengangguran tersebut, berarti naiknya angka pengangguran terbuka akan berpengaruh secara signifikan terhadap menurunnya kesenjangan pendapatan di kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Hasil yang didapatkan cukup membingungkan, karena sudah umum diketahui bahwa penurunan angka pengangguran merupakan salah satu target yang ingin dicapai oleh pemerintah yang baik. Akan tetapi upaya tersebut ternyata akan meningkatkan kesenjangan pendapatan. Penjelasan dari hal ini bisa merujuk kepada analisis yang dikemukakan oleh Gustafsson dan Johansson (1997) dan Dimelis dan Livada (1999), dimana ternyata pengangguran tidak terlalu mempengaruhi orang-orang dengan tingkat pendapatan rendah, sebaliknya pengangguran tersebut lebih mempengaruhi masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi, sehingga kesenjangan pendapatan malah menurun.

Hubungan antara kesenjangan pendapatan dengan pendapatan per kapita di kabupaten dan kota di Jawa Barat ternyata mengikuti hipotesis yang dikemukakan oleh Kuznets. Hal ini dibuktikan dengan signifikannya variabel IPC2 sebagai faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan. Dengan probabilitas t-statistik sebesar 0,0172, maka variabel ini akan signifikan sebagai faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan pada tingkat kepercayaan 95%, dan bahkan akan signifikan sampai pada tingkat kepercayaan 98,28%.

Hal ini berarti, di kabupaten dan kota di Jawa Barat, pada tingkat pendapatan per kapita yang rendah, kesenjangan pendapatan cenderung meningkat. Sampai pada tingkatan pendapatan perkapita tertentu, kesenjangan pendapatan tersebut akan mulai berkurang seiring dengan kenaikan pendapatan perkapita. Pada tingkat pendapatan perkapita yang sudah relatif tinggi, kesenjangan pendapatan tersebut akan semakin berkurang.

Perkiraan Kurva Kuznets untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat, periode 1999-2005



Sumber: Pengolahan data

Pembuktian lain yang melengkapi hasil estimasi tersebut bisa dilakukan dengan menghubungkan antara data koefisien Gini semua kabupaten dan kota selama periode analisis dengan PDRB per kapita masing-masing menggunakan diagram *scatter*. Dari gambar tersebut bisa ditunjukkan koordinat masing-masing data, dan dari kumpulan koordinat tersebut bisa diperkirakan bentuk kurva yang mewakili semua titik. Kurva yang didapatkan bisa dikatakan menyerupai huruf U terbalik, sehingga hasil ini membantu menjelaskan hasil yang didapatkan dari estimasi. Dari bentuk kurva tersebut, hubungan antara kesenjangan pendapatan dengan pendapatan perkapita (diproksi dengan PDRB per kapita) bisa dikatakan mengikuti hipotesis yang dikemukakan oleh Kuznets.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan di kabupaten dan kota di Jawa Barat, akan tetapi pengaruh tersebut tidak terlalu signifikan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan menurunnya kesenjangan pendapatan.

2. Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan di kabupaten dan kota di Jawa Barat, akan tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan.
3. Sektor pemerintah berpengaruh negatif dan sangat signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sehingga kenaikan proporsi pengeluaran pemerintah dalam PDRB akan secara signifikan menurunkan kesenjangan pendapatan.
4. Ketersediaan sumber daya alam memiliki pengaruh positif terhadap kesenjangan pendapatan di kabupaten dan kota di Jawa Barat, akan tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan.
5. Tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sehingga naiknya angka pengangguran terbuka, secara signifikan akan mengakibatkan penurunan kesenjangan pendapatan.
6. Dari hasil analisis, ternyata hubungan antara kesenjangan pendapatan dan pendapatan per kapita di kabupaten dan kota di Jawa Barat, mengikuti hipotesis yang dikemukakan oleh Kuznets, dimana pada pendapatan per kapita yang masih rendah, kesenjangan pendapatan akan meningkat, dan

kemudian seiring dengan makin tingginya pendapatan perkapita, kesenjangan tersebut akan mulai menurun.

Beberapa poin yang bisa dijadikan sebagai saran dan masukan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu disertai dengan upaya-upaya untuk memastikan agar manfaat pertumbuhan tersebut bisa lebih terdistribusi secara merata diantara segenap lapisan masyarakat, sehingga pertumbuhan tinggi tersebut tidak hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja.
2. Pengelolaan terhadap sektor pendidikan perlu lebih ditingkatkan lagi, terutama untuk lebih meningkatkan peran sektor pendidikan terhadap pengurangan kesenjangan pendapatan.
3. Proporsi pengeluaran pemerintah yang memberikan dampak redistribusi dan pemerataan terhadap segenap lapisan masyarakat agar dipertahankan, dan lebih ditingkatkan lagi, sehingga bisa memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap berkurangnya kesenjangan pendapatan.
4. Pengelolaan terhadap sumber daya alam perlu dilakukan secara lebih

bijaksana lagi, sehingga memiliki efek distribusi yang lebih baik diantara segenap lapisan masyarakat, dan pada gilirannya diharapkan akan membantu mengurangi kesenjangan pendapatan.

5. Penyediaan dan penciptaan lapangan kerja, baik secara langsung dihasilkan oleh pemerintah maupun memfasilitasi terciptanya lapangan pekerjaan yang baru tersebut merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Selain itu pemerintah dan swasta harus turut berperan agar lapangan pekerjaan yang sudah ada tidak berkurang, sehingga tidak tercipta penganggur-penganggur baru. Dalam hal kebijakan, diharapkan aturan-aturan yang diberlakukan dan implementasinya akan membantu masyarakat mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan dan usaha secara layak.
6. Untuk penelitian berikutnya, analisis bisa dilengkapi dengan memasukkan beberapa faktor lain yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan, yang belum dimasukkan ke dalam penelitian ini, dan juga bisa dipertimbangkan menggunakan indikator-indikator lain bagi masing-masing faktor tersebut. Selain itu, juga bisa dipertimbangkan untuk melakukan analisis secara simultan, sehingga bisa dianalisis apakah terdapat hubungan timbal balik antara

kesenjangan pendapatan dengan faktor-faktor lain tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Barro, Robert J. 1999. *Inequality, Growth, and Investment*. National Bureau of Economic Research.
- Bresnahan, T.F. 1997. *Computerization and Wage Dispersion: An Analytical Reinterpretation*. Stanford Economics Department Working Paper 97031.
- Fielding, David and Sebastian Torres. 2005. *A Simultaneous Equation Model of Economic Development and Income Inequality*. JEL categories 01, 04.
- Chang, J.Y., Ram, R. 2000. "Level of Development, Rate of Economic Growth and Income Inequality". *Economic Development and Cultural Change* Vol.48, No.4, hlm.787-799.
- Clarke, G., Xu, L.C., Zou, H. 2003. *Finance and Income Inequality: Test of Alternative Theories*. World Bank Policy Research Working Paper 2984.
- Cornia, G.A., Kiiski, S. 2001. *Trend in Income Distribution in the Post-World War II Period*. UNU/WIDER Discussion Paper No. 2001/89.
- Crenshaw, E.M. 1993. *Policy, Economy, and Technoecology: Alternative Explanation for Income Inequality*. *Social Forces* Vol.71, No.3, hlm.807-816.
- Dimelis, S., Livada, A. 1999. *Inequality and Business Cycles in the U.S. and European*

- Union Countries*. International Advances in Economic Research Vol. 5, No. 2, hlm. 321-338
- Doessel, D.B., Valadkhani, A. 1998. *Economic Development and Institutional Factors Affecting Income Distribution: The Case of Iran 1967-1993*. International Journal of Social Economics Vol. 25, No. 2/3/4, hlm. 410-423.
- Durham, J.B. 1999. "Econometrics of Income Distribution: Toward More Comprehensive Specification of Institutional Correlates". Comparative Economic Studies Vol. XXXXI, No. 1, hlm. 43-74.
- Edward, S. 1997. *Trade Policy, Growth, and Income Distribution*. American Economic Review Vol.87, hlm.205-210.
- Ferreira, F.H.G. 1999. *Inequality and Economic Performance: A Brief Overview to Theories of Growth and Distribution*. World Bank
[<http://www.worldbank.org/poverty/inequal/econ/>] 25/01/2002.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics* 4th Edition, McGraw-Hill International Edition
- Gustafsson, B., Johansson, M. 1997. *In Search for a Smoking Gun: What Makes Income Inequality Vary Over Time in Different Countries?*. LIS Working Paper No. 172.
- Herry Subagyo. 2003. *Pengembangan Ekonomi Rakyat di Era Otonomi Daerah*. Artikel no.11 Tahun I, Jurnal Ekonomi Rakyat.
- Hsiao, Cheng. 1986. *Analysis of Panel Data*. UK: Cambridge University Press.
- Irawan dan M. Suparmoko. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. BPFE – Yogyakarta.
- Kaasa, Anneli. 2005. *Factors of Income Inequality and Their Influence Mechanism: A Theoretical Overview*. Faculty of Economics and Business Administration, University of Tartu.
- Mubyarto & Daniel W. Bromley. 2002. *A Development Alternative for Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Indonesia
- Nielsen, F., Alderson, A.S. 1997. *The Kuznets Curve and the Great U-Turn: Income Inequality in U.S. Counties, 1970 to 1990*. American Sociological Review Vol. 2, hlm. 12-33.
- Snower, D.J. 1999. *Causes of Changing Earnings Inequality*. IZA Discussion Paper No.29
- Stewart, Frances. 2000. *Income Distribution and Development*. QEH Working Paper Series – QEHWPS37.
- Sadono Sukirno. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan dasar Kebijakan*. Jakarta, LPFE-UI dan Bina Grafika.
- Sumitro Djodjohadikusumo. 1994. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta, LP3ES.
- Sutyastie Sumitro dkk. 2003. *Analisis Ekonomi Jawa Barat*. Bandung, Unpad Press.

- Sutyastie Sumitro dan Prijono Tjiptoherijanto, 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Sylvester, K. 2002. *Can Education Expenditures Reduce Income Inequality?*. *Economics of Education Review* Vol. 21, No. 1, hlm.. 43-52
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Tranformasi Ekonomi di Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat.
- The Kian Wie. 1983. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Beberapa Pendekatan Alternatif*. Jakarta, LP3ES.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi ke-tujuh, Jilid I. Terjemahan Haris Munandar, Jakarta, Erlangga.
- Viktor Pirmana. 2006. *Analisis Kesenjangan Penghasilan di Indonesia: Aplikasi Pendekatan Dekomposisi Dengan Menggunakan Data Sakernas*. Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung.